

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS UDAYANA  
**SUB UNIT KERJA** : UNIVERSITAS UDAYANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA BAGUS WYASA PUTRA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA DAN INFORMASI
3. NHK : 643032

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/175 m2 di KOTA DENPASAR  
, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 567.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
29.500.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
165.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
200.000.000
4. MOTOR, HONDA NC11BF 1CB A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA AFX 12U 21C08 M/T Tahun 2017, HASIL  
SENDIRI Rp. 12.500.000
6. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 81.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 429.030.302**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.827.030.302**III. HUTANG** Rp. 338.899.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.488.131.302

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.